

# LAPORAN

## PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

REKONTRUKSI DAN PELURUSAN SEJARAH  
TENTANG G 30 S GURU-GURU SMU

SE GERBANGKERTASUSILA



\*003203141\*

KKB

KK-2B

959.803 6

Rek.



3000032033141

MILIK  
PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA

FAKULTAS SASTRA  
UNIVERSITAS AIRLANGGA

DANA DIKS TAHUN 2002  
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA

**LAPORAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**REKONSTRUKSI DAN PELURUSAN SEJARAH  
TENTANG G 30 S GURU-GURU SMU SE  
GERBANGKERTASUSILA**



**MILIK  
PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA**

**JURUSAN ILMU SEJARAH  
FAKULTAS SASTRA  
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

3000032033141

**DANA DIKS TAHUN 2002  
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA**

**LAPORAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**REKONSTRUKSI DAN PELURUSAN SEJARAH  
TENTANG G 30 S GURU-GURU SMU SE  
GERBANGKERTASUSILA**

**FAKULTAS SASTRA  
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**DANA DIKS TAHUN 2002  
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA**

**REKONSTRUKSI DAN PELURUSAN SEJARAH  
TENTANG G 30 S GURU-GURU SMU SE  
GERBANGKERTASUSILA**



**KETUA:**

**DRS. SUKARYANTO, M.Si.**

**PENYANDANG DANA: DIK SUPLEMEN TAHUN 2002**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkah, rahmat, dan ridlo-Nya sehingga program pengabdian pada masyarakat dengan tema **REKONSTRUKSI DAN PELURUSAN SEJARAH TENTANG G 30 S TERHADAP GURU-GURU SMU SE GERBANGKERTASUSILA** ini dapat dilaksanakan dengan lancar.

Berkaitan dengan hal tersebut panitia pelaksana mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ketua LPKM Universitas Airlangga yang telah memberikan kesempatan dan dana bagi terselenggarakannya pengabdian ini.
2. Dekan Fakultas Sastra Universitas Airlangga Surabaya yang telah memberi kesempatan pada tim kami untuk melakukan kegiatan pengabdian.
4. Kepala SMU Negeri 2 Surabaya yang telah menyediakan tempat pertemuan untuk melakukan pelatihan
5. Ketua MGMP Sejarah SMU Kota Surabaya dan sebagai koordinator Guru sejarah SMU se Gerbangkertasusila yang telah membantu mengkoordinasi para guru sejarah se kawasan Gerbangkertasusila.
6. Semua pihak yang telah membantu demi terselenggarakannya pengabdian ini yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.

Semoga atas bantuan, amal, dan budi baik Bapak/Ibu yang tersebut di atas mendapat imbalan dari Tuhan Yang Maha Esa.

Kami, panitia pelaksana sangat menyadari betapa kurang sempurnanya pelaksanaan pengabdian yang kami lakukan. Untuk itu kami membuka saran dan kritik dari semua pihak demi sempurnanya pelaksanaan pengabdian pada masyarakat pada masa-masa selanjutnya.

Surabaya, 1 November 2002  
Ketua Pelaksana

## RINGKASAN

Pelaksanaan pengabdian tentang: **REKONSTRUKSI DAN PELURUSAN SEJARAH TENTANG G 30 S PADA GURU-GURU SMU SE GERBANGKERTASUSILA** ini diselenggarakan pada tanggal 25 Oktober 2002 di aula SMU Negeri 2 Surabaya Jl. Kusuma Bangsa Surabaya.

Jumlah peserta sebanyak sekitar 25 peserta dengan menerima materi pengabdian seperti di atas dengan empat bagian, yakni:

1. Selayang Pandang Sejarah Indonesia Mutakhir.
2. Objektivitas dan Subjektivitas Sejarah
3. Sumber, Fakta, dan Interpretasi Sejarah.
4. Rekonstruksi Sejarah pada Masa Orde Baru.

Tujuan Pelatihan ini yakni meningkatkan kemampuan intelektual dalam hal ini kemampuan menganalisis fenomena sejarah, terutama pada masa Orde Baru, dan meningkatkan daya kritis membaca karya sejarah. Di samping itu -tidak kalah penting- bertujuan agar para peserta bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan siswa tentang beberapa hal yang diragukan. Misalnya, seringkali siswa menanyakan masalah seputar G 30 S pada sub keterlibatan PKI, keterlibatan Soekarno, keberadaan Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret 1966), keterlibatan pihak asing, dan masih ada yang lain.

Pada pelaksanaan tanggal 1 November 2002 dilakukan pre tes sebelum pemberian materi pengabdian kepada peserta dengan menggunakan metode tanya jawab langsung kepada peserta.

Hal itu dimaksudkan untuk mengetahui seberapa sejauh pemahaman para peserta terhadap penuisan sejarah Indonesia pada masa Orde baru.

Secara garis besar, pelaksanaan pengabdian ini dapat berjalan lancar dan sesuai dengan rencana.

**DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR .....	ii
RINGKASAN .....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
BAB I : PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Rumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan Pengabdian .....	4
1.4 Manfaat Pengabdian .....	4
1.5 Metode Kegiatan .....	5
1.6 Sasaran Pengabdian .....	5
1.7 Organisasi Pelaksana .....	6
BAB II : PELAKSANAAN PENGABDIAN .....	7
2.1 Gambaran Umum pelaksanaan .....	7
2.2 Inti Pelaksanaan .....	8
BAB III : PENUTUP .....	25
3.1 Kesimpulan .....	25
3.2 Saran .....	25
KEPUSTAKAAN .....	27
LAMPIRAN (Daftar Peserta dll) .....	29



## BAB I

### 1.1 Latar Belakang

Berkaitan dengan situasi reformasi dewasa ini dengan ditandai oleh gejala euforia demokratisasi, maka di ranah sejarah terjadi saling-silang pendapat tentang kebenaran sejarah Indonesia. Di satu pihak menyatakan suatu fenomena sejarah sangat benar, namun di pihak lain menganggap suatu kesalahan besar. Misalnya saja tentang persepsi historis terhadap Peristiwa G 30 S/PKI yang terjadi pada tahun 1965. Di satu pihak beranggapan bahwa PKI lah yang mendalangi peristiwa itu, sementara pihak mantan aktivis PKI beserta *onderbouw*-nya menyatakan bahwa yang mendalangi peristiwa itu ialah sejumlah jendral TNI yang ambisi akan kekuasaan. Nah, tarik ulur pendapat itu kini saling bermunculan di kalangan penghamba sejarah, peminat sejarah, dan kini menjadikan para guru sejarah -yang memiliki posisi strategis dalam pewarisan nilai sejarah- pun terganggu dengan situasi seperti di atas. Oleh karena itu nampaknya perlu (dan harus) disiasati sejak dini agar silang pendapat itu bisa klear.

Dengan niat dan itikad baik, kami dari jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Airlangga mengajukan usulan melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat terhadap guru-guru bidang studi sejarah yang tergabung dalam Musyawarah Guru Bidang Studi Sejarah (MGMP- Sejarah) se kota Surabaya. Ada pun judul kegiatan itu yakni: *Klarifikasi dan Rekonstruksi Sejarah dalam Kerangka Pelurusan Sejarah (Penyuluhan kepada Guru-guru Bidang Studi Sejarah SMU/SMTP di Surabaya)*

Klarifikasi sejarah yang dimaksud yakni memberi pencerahan tentang



bagaimana duduk persoalan sejarah yang “dipersengketakan” baik oleh pakar sejarah, guru sejarah, peminat sejarah, maupun oleh khalayak ramai. Sedang yang dimaksud dengan rekonstruksi dalam sejarah yakni menafsirkan kembali ataupun reinterpretasi berbagai fakta sejarah dengan “lensa perspektif” baru (terkini) yang dijiwai oleh semangat reformasi (dan demokratisasi) yang kini tengah melaju dengan kencang. Kedua upaya di atas barangkali dapat dianggap sebagai bagian (kecil) dari upaya pelurusan sejarah oleh pemerintah.

Seorang sejarawan Italia Benedetto Croce (J.M. Romein, 1956: 67) pernah menyatakan proposisi bahwa “*every true history is contemporary history*” yang artinya sejarah yang benar adalah sejarah masa kini. Maksudnya, suatu sejarah selalu dianggap benar oleh masyarakat pada kurun waktu tertentu adalah sejarah yang didasari oleh jiwa zaman (*zeitgeist*) era tertentu. Hal itu juga menyiratkan adanya kehalalan bagi adanya perbedaan interpretasi atas fakta cerita sejarah oleh suatu generasi dengan generasi yang lain (berikutnya). Generasi/angkatan 1966 akan menganggap bahwa dalang utama peristiwa G 30 S/PKI adalah Partai Komunis Indonesia (PKI). Barangkali generasi berikutnya yakni generasi reformasi bisa jadi belum bisa menerima hal itu, nisa jadi memiliki pendapat/interpretasi yang berbeda dengan generasi 1966. Dengan ditemukannya dokumen Gilchrist misalnya, atau pun jika ditemukan dokumen Supersemar, dan juga berbagai pengakuan mantan Napol-Tapol mungkin sekali akan terekonstruksi sejarah yang lebih obuektif.

Lebih lanjut, proposisi Croce di atas juga memiliki makna bahwa sejarah memiliki kebenaran relatif, artinya kebenaran sejarah sangat bergantung subyek

penggali sejarah. Atau dengan kata lain bahwa sejarah merupakan dialektika sepanjang zaman. Hal itu memberi dasar bagi kita untuk selalu merekonstruksi sejarah dari masa ke masa tanpa meninggalkan perangkat norma, kaidah, dan nilai-nilai keilmuan dalam metode penulisan sejarah.

Hasil rekonstruksi sejarah berguna bagi upaya membangkitkan dan menjaga kelangsungan keberadaan solidaritas nasional (persatuan dan kesatuan bangsa). Sebagaimana dikemukakan oleh sejarawan Taufik Abdullah dan Abdurachman Surjomihardjo (1985: ix) akan berlakunya statemen “belajarliah dari sejarah”, artinya sejarah mampu memberi hikmah bagi generasi penerus dan dapat digunakan untuk mewariskan nilai-nilai kejuangan para pendahulu kita.

Di dalam kerangka itu maka perlu peran mediator yang memiliki posisi strategis, salah satunya guru sejarah. Barangkali dengan adanya pengetahuan guru tentang hasil rekonstruksi sejarah terkini seperti di atas, para guru sejarah dapat menyampaikan sejarah yang benar kepada para murid-muridnya yang juga sebagai generasi penerus bangsa.

Mungkin tidak bisa kita ingkari, bahwa terbentuknya sebuah bangsa - seperti halnya bangsa Indonesia- salah satu faktor penyebabnya adalah aspek kesejarahan. Berkat kesamaan historisitas maka pluralitas etnis, agama, golongan, kelas sosial, profesi dan lain-lain, maka kesemuanya memiliki rasa senasib dan sepenanggungan dan solidaritas nasional Indonesia. Hal itu -sekali lagi- disebabkan oleh kesamaan serjarah yang dialami selama kurun waktu yang panjang.

## **1.2 IDENTIFIKASI DAN PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian di atas barangkali dapat dirumuskan permasalahan yang akan disampaikan dalam ajuan pengabdian ini.

1. Bagaimanakah rekonstruksi sejarah yang benar pada masa kini?
2. Bagaimanakah kemampuan guru-guru sejarah yang tergabung di dalam MGMP Sejarah di SMU-SMTP se Kota Surabaya sebelum dan setelah mengikuti penyuluhan? Terutama pemahaman pada materi sejarah seputar G 30 S 1965.

## **1.3 TUJUAN KEGIATAN**

Sesuai dengan permasalahan di atas maka kegiatan pengabdian ini bertujuan:

1. Memberikan pencerahan kepada guru sejarah dalam hal ini MGMP Sejarah se Kota Surabaya akan rekonstruksi sejarah yang benar pada masa kini.
2. Menambah dan memberi kemampuan tentang rekonstruksi sejarah kepada para guru sejarah yang tergabung di dalam MGMP Sejarah SMU-SMTP se Kota Surabaya.
3. Menambah kemampuan para guru sejarah yang tergabung di dalam MGMP Sejarah SMU-SMTP se Kota Surabaya dapat mengajarkan (sekaligus mensosialisasikan) sejarah yang benar kepada para siswanya.

## **1.4 MANFAAT KEGIATAN**

Sesuai dengan tujuan di atas maka kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini memiliki manfaat:

1. Membekali para guru sejarah tentang bagaimanakah rekonstruksi sejarah yang benar dewasa ini.
2. Sehingga guru sejarah dapat mewariskan nilai-nilai sejarah yang benar kepada para siswanya dengan benar.
3. Bila demikian -setelah mengikuti kegiatan pengabdian di dalam kerangka pelurusan sejarah- maka para guru sejarah dapat memberikan andil bagi upaya menjaga solidaritas nasional atau nasionalisme.

## 1.5 METODE KEGIATAN

Metode penyuluhan dalam kegiatan ini digunakan antara lain:

1. Metode Pre-tes dan post-tes

Metode ini digunakan untuk mengukur keberhasilan kegiatan pengabdian. Dengan diketahui perbedaan -lalu dibandingkan dan dianalisis- hasil pre-tes dan post-tes maka akan nampak sejauh mana kegiatan ini berhasil.

2. Metode ceramah

Metode ceramah digunakan untuk menyampaikan materi pengabdian. Dilakukan dengan sistem *double way traffic*/komunikasi dua arah.

3. Metode diskusi

Metode ini digunakan untuk memperdalam materi pengabdian oleh para peserta pengabdian, baik antarpeserta maupun antara peserta dengan nara sumber. Metode diskusi dapat digunakan sebagai indikasi “hidup-matinya” suatu kegiatan pengabdian, Artinya, suasana dalam diskusi sebagai cermin antusias – tidaknya suatu forum ilmiah (pengabdian).

## 1.6 SASARAN PENGABDIAN

Kegiatan pengabdian tentang klarifikasi dan rekonstruksi sejarah ini terkait erat dengan upaya pemerintah di dalam meluruskan sejarah atas kesimpangsiuran kebenaran sejarah, terutama pada masalah konstruksi sejarah G 30 S PKI yang selama ini dinilai kurang objektif oleh banyak kalangan. Hal itu bisa terjadi sebagai akibat dari digunakannya fakta sejarah dari satu pihak saja. Sementara itu manakala konstruksi sejarah dibangun hanya dari sumber sepihak maka menghasilkan konstruksi yang syarat dengan subjektivitas. Sedang faktor subjektivitas membuat sejarah terguncang dari predikatnya sebagai ilmu pengetahuan.

Di samping itu, kadar subjektivitas yang terlalu tinggi bisa mengacaukan stabilitas nasional, misalnya menimbulkan kelompok-kelompok separatis, sentimen etnis, sentimen golongan, dan lain-lain yang membahayakan integrasi nasional.

## 1.7 Organisasi Pelaksana

Struktur organisasi pengabdian ini yaitu:

Penanggungjawab	: drg. H. Achmad Mufid, SKM. (Ketua LPKM Unair)
Konsultan Teknis	: -
Ketua Pelaksana	: Drs. Sukaryanto, M.Si.
Sekretaris	: Drs. Muryadi
Bendahara	: Eni Sugiarti, SS.
Anggota	: Edi Budi Santoso, SS. Purnawan Basundoro, SS., M.Hum. Sarkawi B. Husain, SS., M.Hum.

## **BAB II**

### **PELAKSANAAN PENGABDIAN**

#### **2.1 GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PENGABDIAN**

Pelaksanaan pengabdian dilakukan pada Hari Jum'at tanggal 1 November 2002 di Aula SMU Negeri II Surabaya, Jl. Kusuma Bangsa. Pelaksanaan itu didahului dengan berbagai persiapan, seperti pengurusan izin di instansi terkait, dalam hal ini SMU Negeri 2 Surabaya. Yang lebih penting dalam hal persiapan yakni melakukan lobi terhadap pengurus MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) Sejarah Surabaya. Setelah itu baru dilakukan perencanaan tentang kapan hari dan tanggal pelaksanaan. Lalu disepakati bahwa pengabdian dilakukan pada hari Jumat 1 November 2002 pukul 08.00 sampai dengan 11.30 WIB.

Pelaksanaan diawali dengan sambutan Ketua MGMP Surabaya, yakni Drs. Hirman Pratikto. Setelah itu sambutan dari ketua pengabdian diteruskan dengan pembahasan materi pengabdian oleh Tim Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Airlangga.

## 2.2 Materi Kegiatan (Inti Kegiatan)

Adapun materi pengabdian dapat dilihat sebagai berikut.

### **Klarifikasi dan Rekonstruksi Sejarah dalam Kerangka Pelurusan Sejarah (Penyuluhan kepada Guru-guru Bidang Studi Sejarah SMU/SLTP se Surabaya)**

Upaya pemerintah meluruskan sejarah Indonesia tengah dilakukan pada masa kini. Salah satu dari sekian banyak yang tulis ulang atau reaktualisasi penulisan sejarah tentang seputar peristiwa G 30 S 1965. Di dalam kerangka itu, alangkah baiknya disosialisasikan kepada seluruh warga negara Indonesia hal ihwal yang terkait dengan proses upaya pelurusan sejarah. Kegiatan ini merupakan salah satu bagian dari proses sosialisasi itu. Di dalam asumsi kami, peran guru sangat dominan dalam upaya sosialisasi, khususnya terhadap siswa-siswanya yang juga sebagai generasi penerus bangsa.

Makalah ini terbagi menjadi empat bagian, *pertama* membahas tentang Sejarah Indonesia Mutakhir. Berisikan bahasan tentang model penulisan sejarah di Indonesia semenjak zaman kerajaan, zaman kolonial, dan zaman kemerdekaan. *Kedua*, Objektivitas dan Subjektivitas Sejarah yang berisikan tentang bagaimana tulisan sejarah yang memiliki norma-norma yang benar.

*Ketiga*, pembahasan mengenai Sumber, Fakta, dan Interpretasi Sejarah. Dimaksudkan untuk memberikan bekal pada para guru untuk membedakan mana sumber yang sah dan mana yang tidak. Sekaligus membekali guru sejarah dalam persiapan menulis sejarah lokal dalam kerangka pemberadaan sejarah suatu daerah



sebagai muatan lokal dalam kurikulum baru. *Keempat*, Rekonstruksi Sejarah Masa Orde Baru yang berisikan tentang bahasan G 30 S, keterlibatan Bung Karno, dan masalah Supersemar. Dimaksudkan untuk memberikan penegasan akan objektivitasnya agar para guru sejarah bisa menjelaskan/menjawab dengan benar seputar G 30 S 1965.

### 1. Selayang Pandang Sejarah Indonesia Mutakhir

Benedetto Croce, seorang sejarawan Italia menorehkan berbagai karyanya dalam bentuk falsafah sejarah. Beberapa catatan Croce memiliki beberapa sifat<sup>1</sup> yakni:

- a. Sejarah adalah kisah mengenai kebebasan
- b. Semua sejarah yang benar adalah sejarah sezaman
- c. Sejarah tidak dibangun dari cerita-cerita, melainkan dari dokumen atau dari cerita-cerita yang telah dijadikan dokumen
- d. Sejarawan tidak seharusnya berat sebelah
- e. Pergerakan sejarah bermula dari atas ke bawah.

Bertolak dari corak penulisan sejarah di atas maka seyogyanya -meski suatu karya sejarah merupakan hal bebas- sejarawan memperhatikan unsur-unsur yang menjadi (dijadikan) norma dalam penulisan. Misalnya sejarawan memperjuangkan netralitas, menyadari jiwa zamannya, berdasarkan dokumen yang akurat (sahih), *reliable* (dapat diandalkan), *accountable* (dapat dipercaya), *credible* (dapat dipertanggungjawabkan).

---

<sup>1</sup> Muh. Yusof Ibrahim, dkk., *Sejarawan dan Pensejarahan, Ketokohan dan Karya*. (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia, 1988), hlm. 305-306.

Kita dapat melihat beberapa hasil karya sejarah dari masa ke masa. *Pertama*, dimulai dari corak tradisional yang ditulis oleh para pujangga dan/atau empu yang hidup pada masa kerajaan-kerajaan di Indonesia. Beberapa bentuk karya sejarah tradisional antara lain Babad, Hikayat, Silsilah, Lontara, Kronik, dan mungkin masih banyak yang lain yang sejenis. Meski dengan kandungan cerita fiksi dan istana sentris, karya-karya di atas cukup memiliki makna sebagai dokumen yang mengemukakan fakta yang benar yang tak terbantahkan. Misalnya, di dalam Babad Mataram dikemukakan bahwa Pangeran Senopati dan Ki Gede Pemanahan -sebagai pendiri Kerajaan Mataram (1583)- sebagai orang-orang yang *sakti mandra guna* yang pernah bertapa tidak makan dan tidak minum dengan menenggelamkan diri di sungai selama 40 hari 40 malam. Faktanya, keduanya adalah pendiri Mataram, sedang fiksinya selama berpuluh-puluh hari tidak makan dan tidak minum mungkin bagi sebagian dari kita merupakan hal yang berlebihan, dan bahkan bisa jadi dianggap sebagai hal yang tidak mungkin. Pada hakikatnya, di dalam kerangka menggunakan karya historiografi tradisional sebagai sumber harus dipilah mana yang menjadi fakta keras (*hard fact*) yang tak terbantahkan kebenarannya dan mana fakta tambahan yang mungkin sekali hanya sebagai hiperbola atau “bunga-bunga” untuk membesarkan/mengharumkan nama raja.

*Kedua*, karya historiografi kolonial yang ditulis oleh para sejarawan Belanda dan/atau Eropa ketika menjajah Indonesia. Biasanya bercorak Eropa sentris atau pun Nerlando sentris, dalam arti memandang Hindia Belanda (Nederland Indie) dari kacamata bangsanya Belanda. Misalnya karya Wertheim, Furnival,

Vleke, dan lain-lain. Di dalam karya historiografi kolonial itu bangsa pribumi (Indonesia) diposisikan sebagai obyek. Bila demikian, maka dapat kita katakan bahwa historiografi kolonial masih bercorak subjektif. Kendati demikian, historiografi kolonial kini dapat memberikan penjelasan lebih besar kepada kita, terutama bagi para penghamba ilmu sejarah. Tidak mengherankan apabila kita melihat seorang sejarawan Indonesia menulis tentang Indonesia, mencari data ke negeri Belanda.

*Ketiga*, karya sejarah modern yang biasa kita jumpai pada masa-masa sekarang yakni yang menggunakan pendekatan multidimensional. Artinya, di dalam upaya rekonstruksi masa lampau tidak hanya digunakan data-data dari bidang politik, namun juga digunakan data-data dari aspek sosial, ekonomi, budaya, psikologi, dan lain-lain. Hal itu tentu menambah kelengkapan ataupun kompleksitas suatu rekonstruksi masa lampau. Di samping itu, juga disadari betapa suatu peristiwa sejarah terjadi bukan oleh satu sebab, namun berbagai sebab (multi kausal).

Peristiwa sejarah bukan sebagai akibat dari aspek politik belaka, misalnya Perlawanan Pangeran Diponegoro (1825-1830) bukan hanya dikarenakan oleh Pangeran Diponegoro tidak diangkat menjadi Sultan (Raja Mataram), namun juga sebagai akibat dari kondisi non politik, seperti pihak Istana Mataram terlalu banyak menarik pajak dari rakyat sehingga terlalu banyak membebani penderitaan rakyat, tidak rela jika pemakaman leluhur digusur begitu saja untuk dijadikan jalan raya, perilaku kaum kolonial (warga Belanda) yang tidak sesuai dengan syariat Islam, dan masih banyak yang lain.

Teknis rekonstruksi di dalam kerangka historiografi modern itu berbentuk meminjam istilah-istilah, konsep-konsep, dan teori-teori ilmu-ilmu sosial yang lain. Misalnya di dalam merekonstruksi masyarakat Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin (1959-1966) atau pun masa-masa menjelang meletusnya G 30 S 1965, akan lebih andal apabila meminjam konsep sosiologi seperti struktur sosial, patron klien, interaksi sosial, konflik (horisontal dan vertikal), dan lain-lain.

Bagaimanakah struktur sosial pada waktu itu, kemudian bagaimana interaksi antar kelas (kelompok), bagaimana konflik terjadi, dan lain-lain. Di dalam tinjauan sosiologis-politis, salah satunya ditemukan bahwa di dalam interaksi sosial masyarakat Indonesia (Jawa) ada keamatan hubungan antara buruh tani (klien) dengan tuan tanah/ *wong baon*<sup>2</sup> (patron). Hubungan itu dikenal sebagai hubungan patron-klien (*patron-client relationship*).<sup>3</sup> Di dalam interaksi antarkeduanya, terjadi pertukaran sosial (*social exchange*) secara adil, si Patron mendapatkan tenaga kerja, keseganan, gengsi, dan kehormatan; sementara si Klien mendapatkan imbalan upah, perlindungan, keamanan, dan jaminan kelangsungan hidup. Keamatan hubungan antarkeduanya itu dapat dikatakan harmonis, karena terjadi simbiosis mutualisme.

Fakta sosial yang menyatakan jalinan dalam masyarakat Indonesia - khususnya Jawa- yang erat seperti di atas tidak dapat dijadikan sasaran implementasi teori konflik Marxisme oleh PKI. Meskipun agitasi PKI secara

<sup>2</sup> *Wong baon* adalah sebutan di dalam masyarakat pedesaan untuk menyebut seseorang petani yang memiliki sawah ber-*bau-bau*. *Bau* adalah ukuran luas tanah seluas  $\frac{3}{4}$  hektar.



gencar memprovokasi kelompok buruh tani, bahwa tuan tanah di desa itu disebut sebagai salah satu setan desa, sebagian besar kelompok buruh tani tidak melakukan perlawanan terhadap kelompok tuan tanah. Bahkan di beberapa tempat yang terjadi malah konflik terbuka antara buruh tani versus buruh tani, masing-masing kelompok buruh tani membela patronnya masing-masing. Analisis sosiologis di atas sangat bermanfaat untuk menjelaskan mengapa PKI gagal total dalam melakukan G 30 S 1965.

Barangkali itulah salah satu contoh teknis penggunaan istilah-istilah, konsep-konsep dan teori-teori ilmu-ilmu sosial yang lain seperti sosiologi, antropologi, psikologi, politik, ekonomi, dan lain-lain.

## 2. Objektivitas dan Subjektivitas Sejarah

Masalah dalam penulisan sejarah yang tidak dapat disembuhkan yakni masalah subjektivitas sejarah. Maknanya, semua tulisan sejarah mengandung unsur subyektivitas penulisnya, baik disadari maupun tidak, baik sedikit maupun banyak. Semenjak memilih topik, menetapkan judul, dan mencari bahan/melacak sumber, analisis/interpretasi, hingga pembuatan laporan, seorang sejarawan sudah terperangkap ke dalam tempurung subyektivitas. Beberapa unsur subyektivitas sejarawan itu antara lain pribadi, agama, kebangsaan, kepartaian sejarawan, etnis, bahasa, profesi,

---

<sup>3</sup> Tentang hubungan patron-klien bisa dilihat dalam James C. Scott, *Perlawanan Kaum Tani* (Jakarta: LP3ES, 1983).

kemampuan, intelegensia, usia jenis kelamin, zaman (ketika penulis hidup), kebudayaan, dan masih banyak yang lain.<sup>4</sup>

Bila demikian itu benar, maka subjektivitas-objektivitas dapat dijadikan tolok ukur atas keandalan, validitas, reabilitas, dan akuntabilitas suatu karya sejarah. Bisa jadi, hasil rekonstruksi yang minim dengan subjektivitas di atas akan dianggap tinggi nilainya, sebaliknya yang mengandung subjektivitas tinggi akan dianggap bernilai rendah, kurang andal.

Seusai data terkumpul, data tidak hanya dijejer begitu saja dalam suatu urutan waktu kronologis. Namun, fakta atau data itu baru memiliki makna setelah dikaitkan maknanya antara yang satu dengan yang lain. Di dalam kaitan ini, seseorang sejarawan baru bisa memberikan penjelasan setelah terlebih dahulu menetapkan sudut pandang tertentu.<sup>5</sup> Sudah barang tentu, sudut pandang itu sangat ditentukan pada pandangan hidup, nilai-nilai moralitas, afiliasi politik, dan lain-lain subyektivitas. Seorang kristen bisa jadi menganggap bahwa keikutsertaannya di dalam Perang Salib sebagai suatu keharusan dan mulia. Seorang muslim menganggap perlawanannya terhadap kaum kafir sebagai perang di jalan Allah (*jihad fi sabilillah*), bila mati akan masuk surga. Demikian pula seorang nasionalis, perlawanannya terhadap kaum kolonial sebagai perjuangan pembebasan (*struggle of independence*). Sementara itu kaum kolonial bisa saja benar menganggap bahwa perlawanan kaum nasionalis itu sebagai gerakan

---

<sup>4</sup> Pendapat van der Pot, seorang sejarawan Belanda. Lihat Sartono Kartodirdjo, *Lembaran Sedjarah* No. 2 Tahun 1970 (yogyakarta: Seksi Penelitian Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada, 1970), hlm. 7.

<sup>5</sup> Sartono Kartodirdjo, *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia: Suatu Alternatif* (Jakarta: Gramedia, 1982), hlm. 7.

pengacau keamanan ataupun gerakan kaum ekstremis. Bisa jadi tepat bahwa bentuk-bentuk subyektivitas atau pun sudut-sudut pandang seperti di atas bisa menjadi pangkal “warna” ataupun “irama” dalam suatu hasil rekonstruksi masa lampau.

Subyektivitas juga dipengaruhi oleh ruang dan waktu ketika seorang sejarawan hidup dan berkarya. Suatu periode waktu atau zaman memiliki jiwa zaman (*zeitgeist*) yang berbeda dengan zaman sebelum dan sesudahnya. Perbedaan jiwa zaman itu juga menimbulkan perbedaan di dalam penulisan sejarah. Meskipun berbeda, masing-masing zaman akan membenarkan tulisan sejarah pada masanya. Hal itu didasari oleh pendapat seorang sejarawan Italia, Benedetto Croce yakni sejarah yang benar adalah sejarah masa kini (*every true history is contemporary history*).<sup>6</sup> Semua peristiwa masa lampau itu memang sudah berlalu dan mati. Fakta bisa bermakna setelah digabungkan dengan kehidupan masa sekarang, ataupun masa setelah peristiwa sejarah terjadi. Pemaknaan fakta sejarah bisa menjadi suatu kebenaran sejarah pada era tertentu, namun belum tentu menjadi kebenaran sejarah pada era yang lain (berikutnya).

Sebagai konsekuensinya, kebenaran sejarah suatu periode/zaman tertentu memiliki perbedaan dengan kebenaran sejarah suatu zaman setelah ataupun periode sebelumnya. Seseorang yang pada era tertentu dianggap sebagai pahlawan (hero) bisa jadi dianggap sebagai pengkhianat pada era berikutnya. Sebaliknya, seseorang yang semula dianggap sebagai pengkhianat, pada periode selanjutnya bisa saja menjadi pahlawan.

Searah dengan perubahan jiwa zaman itu, terjadi pula perubahan menyangkut peristilahan di dalam menyebut suatu peristiwa sejarah. Pada masa Demokrasi Liberal (1950-1959) hingga masa Demokrasi Terpimpin (1959-1966) menyebut peristiwa Agresi I dan II sebagai **Aksi Polisional I dan II**, menyebut Perang Kemerdekaan II sebagai *Clash I* dan *Clash II*, juga Pengakuan Kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949 sebagai **Penyerahan Kedaulatan**. Juga pada era reformasi seperti sekarang ini menyebut G 30 S PKI dengan **G 30 S 1965**, sebab diduga belum tentu PKI terlibat langsung atau sebagai pokok atau dalang yang melakukan pemberontakan. Juga, banyak tokoh yang pada masa Orde Baru dianggap dan ditetapkan sebagai pahlawan dan disanjung-sanjung, pada masa sekarang dicaci-maki dan dianggap sebagai pembawa mala petaka bangsa.

Nah, dari uraian di atas maka bolehlah kiranya dikatakan bahwa subyektivitas selalu mewarnai “irama” dan kebenaran suatu hasil karya rekonstruksi masa lampau. Dan itu menjadikan ilmu sejarah oleh Taufik Abdullah memiliki sakit yang tidak terobati, yakni kandungan kadar subjektivitas.

### **3. Sumber, Fakta, dan Interpretasi Sejarah**

#### **3.1 Sumber Sejarah**

Sumber informasi di dalam studi sejarah dapat dikategorikan berdasarkan sifatnya yakni *sumber primer* dan *sumber sekunder*. Sumber primer dimaksudkan untuk menunjuk pada sosok subyek/benda yang dekat dengan

---

<sup>6</sup> Lihat Sartono Kartodirdjo, *Lembaran Sedjarah, op. cit.*, hlm. 32.



### 3.2 Fakta Sejarah

Setelah sumber sejarah dikritik “habis-habisan” dan lolos maka sumber tersebut dapat digunakan untuk rekonstruksi masa lampau. Sumber sejarah yang lolos seleksi mengandung atau menunjuk suatu fakta tentang suatu peristiwa sejarah. Jadi, fakta sejarah adalah suatu hal yang menunjuk suatu peristiwa sejarah yang dapat dipercayai kebenarannya.

Fakta-fakta itu nantinya diseleksi relevansi dan keterkaitannya dengan tema/fokus kajian yang dipilih oleh sejarawan. Fakta-fakta sejarah yang lolos seleksi dapat dikatakan sebagai data bagi upaya penulisan sejarah. Pemilahan data ditujukan untuk menghindarkan penyimpangan, bias, atau pembelokan dari tema yang sudah direncanakan semula.

### 3.3 Interpretasi Sejarah

Di dalam suatu penelitian biasanya ada tahap analisis atau verifikasi data. Di dalam kajian sejarah analisis data biasa dikenal sebagai tahap interpretasi data. Atau dengan kata lain memberikan “daging” pada “kerangka” yang sudah tersedia.

Di dalam rangka interpretasi data seorang sejarawan dituntut dapat menjaga agar terhindar dari subyektivitas yang tinggi dan netralitas. Di sinilah awal dalam menuju posisi/letak tinggi-rendah nilai suatu hasil karya sejarah.

#### 4. Rekonstruksi Sejarah pada Masa Orde Baru

Croce<sup>7</sup> berpendapat bahwa untuk memahami masa kini, sejarawan terpaksa melihat dan merujuk masa lalu, karena pada hakikatnya masa kini itu adalah hasil (kesinambungan) dari masa lalu, masa mendatang adalah hasil (kelanjutan) dari masa kini. Masa lalu bukanlah suatu yang sudah mati atau pupus, tetapi semangat, jiwa, dan pemikirannya masih hidup untuk diambil dan disaring oleh masa kini bagi kepentingan-kepentingan tertentu, dalam arti kepentingan bersama suatu bangsa.

Barangkali, era reformasi, demokratisasi, dan otonomisasi seperti sekarang ini masih memerlukan pengalaman sejarah perjalanan bangsa pada masa-masa lalu. Jiwa, semangat, dan pemikiran masa lalu yang telah terjadi (dan tidak terulang lagi itu) bisa diambil dan disaring manfaatnya. Atau setidaknya sebagai pembandingan dan/atau tolok ukur bagi suatu kemajuan yang dicapai pada masa kini dan mendatang. Barangkali, sistem ketatanegaraan yang otoritarian dan sentralistik pada masa lalu -Orde Baru dan Orde Lama- tidak boleh terulang kembali pada masa reformasi seperti sekarang ini. Begitu pula kejadian-kejadian yang bersifat destruktif yang menelan banyak korban warga negara seperti G 30 S 1965 seyogyanya tidak terulang kembali.

Pada umumnya kita warga negara Indonesia yang hidup -dalam arti dibesarkan pada era Orde Baru 1966-1998- menganggap bahwa peristiwa G 30 S 1965 merupakan kejadian yang menakutkan, karena pada peristiwa itu terjadi pembantaian besar-besaran terhadap sesama warga negara, baik yang menjabat pada jabatan penting maupun terhadap rakyat biasa,

dilakukan/didalangi oleh PKI, didukung oleh Presiden RI waktu itu Ir. Soekarno, dan lain-lain. Biasanya warga negara yang menjadi korban adalah yang tidak seide, sependapat, seprinsip, dan seazas dengan para pembantai (PKI). Meskipun begitu masih ada kejanggalan-kejanggalan terhadap kebenaran di atas, misalnya benarkah pembantaian itu dilakukan oleh PKI, benarkah yang dibantai itu musuh politik PKI, benarkan Soekarno terlibat dalam gerakan G 30 S, benarkah Surat Perintah 11 Maret itu dibuat Bung Karno, atukah (bila benar dibuat oleh Bung Karno) benarkah isinya seperti itu (memberikan mandat kok kepada Dan Kostrad bukan kepada KASAD misalnya), dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan lain yang perlu mendapat tinjauan kembali, bahkan diperlukan penulisan ulang guna meluruskan yang sebenarnya. Dari berbagai pertanyaan akan keraguan kebenaran sejarah di atas, berikut ini disampaikan sedikit fragmen/pecahan peristiwa dalam rentetan G 30 S 1965.

#### **4.1 PKI: Sebagai Pelaku Peristiwa G 30 S 1965**

Pada masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965) ada program Nasakom (Nasionalis, Agama, dan Komunis), maksud program itu adalah menyatukan tiga kekuatan/pilar utama politik di Indonesia. Meskipun sebenarnya ketiganya tidak dapat disatukan secara bulat, dalam arti menjadi satu kesatuan yang utuh. Ketiganya bisa terhimpun di dalam program Nasakom, namun tidak sampai pada persatuan yang hakiki. Bahkan bisa dikatakan bagaikan air dan minyak, meskipun dicampur menjadi satu namun tidak menyatu tetapi saling terpisah di dalam satu wadah. Sementara ada perpaduan tiga kekuatan itu, timbul satu kekuatan yang tak dapat

---

<sup>7</sup> Muh. Yusof Ibrahim, *Ibid.*, hlm. 307.

diabaikan, yakni kekuatan militer, yakni Angkatan Darat Republik Indonesia, yang sejak semula tidak setuju dengan masuknya personel PKI di dalam kabinet. Namun kenyataannya, ada beberapa tokoh PKI yang diangkat oleh Bung Karno menjadi menteri, meskipun menteri portofolio (tanpa departemen).

Sebagai konsekuensi atas masuknya anggota PKI ke dalam pemerintahan itu, maka stabilitas politik menjadi tidak terjamin, atau suhu politik menjadi semakin memanas. Banyak kebijakan pemerintah yang kontroversial, seperti akan dibentuk Angkatan Ke Lima (petani dan buruh tani yang dipersenjatai). Hal itu jelas-jelas menuju ke arah dilegalkannya sipil bersenjata, seperti BTI (Barisan Tani Indonesia), Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia), dan beberapa kelayakaran yang lain.

Dalam pada itu, PKI melakukan gerakan agitatif yang memojokkan pihak-pihak tertentu (yang tidak bersalah), misalnya Kabir (kapitalis birokrat), untuk menunjuk pada pegawai pemerintah yang memiliki kekayaan berlimpah, Tujuh Setan Desa untuk menunjuk para tokoh-tokoh di desa-desa yang memiliki kekayaan besar (tanah, ternak, usaha dagang, dan pabrik) seperti tuan tanah (petani kaya), aparat desa (yang bertanah bengkok), para Kyai (yang punya ilmu dan santri), dan lain-lain.

Berdasarkan uraian fakta di atas, maka boleh dikatakan bahwa PKI sangat terlibat di dalam peristiwa G 30 S 1965. Lebih lanjut untuk menegaskan bahwa ada keterlibatan PKI, berikut dikutip pernyataan Sudisman, seorang yang menjabat Sekretaris Jendral PKI waktu itu.

“ ..... Saya sendiri terlibat dalam G 30 S yang gagal. Kegagalan itu berarti pula kegagalan saya dalam memimpin PKI sehingga mendorong jadi unggulnya pihak lawan politik PKI”.<sup>8</sup>

Pengakuan Sudisman itu merupakan suatu kebenaran yang tidak bisa dibantah, bahwa PKI terlibat di dalam peristiwa G 30 S 1965. Meskipun ada skenario di balik peristiwa itu, misalnya ditemukannya dokumen Gilchrist yang menyatakan bahwa di dalam peristiwa G 30 S ada keterlibatan agen/intelejen rahasia CIA Amerika Serikat.

#### 4.2 Keterlibatan Soekarno dalam G 30 S 1965

Seringkali di kalangan siswa SLTP dan SMU bertanya tentang kebenaran keterlibatan Bung Karno di dalam peristiwa G 30 S 1965. Dalam arti sebagai pihak yang ikut melakukan pemberontakan. Hal itu didasarkan pada upaya pemerintah baru (Orde Baru) giat melakukan upaya menyingkirkan Bung Karno. Seusai peristiwa penculikan para jendral pada 30 September 1965, Bung Karno kok terus didemo secara besar-besaran oleh rakyat. Sementara itu pihak militer (ABRI) kok malah mendukung aksi demo? Biasanya ABRI anti aksi demo, seperti yang terjadi sepanjang masa Orde Baru. Dari hal itulah ada sedikit persoalan mengapa pihak tentara *kok* tidak melindungi seorang presiden, sebuah pertanyaan yang perlu dijawab secara arif.

Untuk menjawab pertanyaan itu, perlu kiranya dipandang bahwa peristiwa G 30 S PKI sebagai puncak dari pertarungan politik antar faksi kala itu. Di dalam

---

<sup>8</sup> Anhar Gonggong “G 30 S (“PKI”) dan Spersemar: Analisis Historis. Makalah Seminar Hari Pahlawan 56 MSI Cabang Jawa Timur 8 November 2001 di Untag Surabaya. Beliau mengutip dari *Pledoi Sudisman: Kritik Oto Kritik Seorang Politbiro CC PKI*, Teplok Press, Jakarta. Cetakan III, Tahun 2001, hlm. 11.

perpektif yang demikian itu -pada era Demokrasi Terpimpin- Presiden dapat dianggap sebagai “Bapak” dari semua golongan/faksi yang tengah berlomba-menggapai kekuasaan kala itu. Minimal ada tiga faksi yang bertarung, yakni militer (dalam hal ini TNI AD), kaum nasionalis beraliansi dengan kelompok agamis, dan kelompok komunis. Meskipun di dalam faksi-faksi itu juga terjadi polarisasi, namun secara sederhana kita anggap seperti itu. Sebagai “Bapak” sulit untuk melakukan perlakuan yang adil oleh semua “anaknya”. Di dalam kondisi anak saling bertengkar itulah timbul banyak isu tentang keberpihakan Presiden Soekarno Isu-isu itu saling berbeda dan bahkan saling berlawanan. Ada yang menyebut Bung Karno sebagai antek PKI, mendukung aksi-aksi PKI selama ini, dan lain-lain. Sebagai akibatnya, Presiden tersudutkan oleh isu-isu yang provokatif itu. Bahkan mengalami suatu kebingungan hingga tidak mampu mengatasi kacaunya situasi dan kondisi politik paska G 30 S. Untuk memulihkan situasi *chaos* itu, Presiden Soekarno memberikan mandat penuh kepada ABRI -dalam hal ini Panglima Kostrad- untuk bertindak memulihkan ketertiban dan keamanan. Dari situlah nampak, bahwa Bung Karno -yang juga sebagai Pangti ABRI dan PBR- telah bertindak sesuai prosedur sebagaimana mestinya, yakni mengembalikan situasi kepada pihak militer selaku “pagar negara”.

Bilamana Bung Karno tidak memberikan mandat kepada militer, barangkali akan jatuh di posisi keberpihakan salah satu faksi yang tengah bertarung. Selaku “Bapak” tidak boleh berpihak kepada salah satu “anak”. Isu bahwa Bung Karno terlibat di dalam G 30 S dapat dianggap hanya sebagai isu politis ataupun



agitasi politik yang kemunculannya sangat biasa di dalam proses merebut kekuasaan, apalagi dalam situasi *chaos* seperti pada saat-saat seusai paska G 30 S meletus. Isu-isu itu dapat digunakan sebagai alat untuk mendiskreditkan lawan politik agar dijauhi massa. Di samping itu, isu yang provokatif seperti itu bisa menaikkan pamor politik ataupun *bargaining* politik suatu kelompok peserta pertarungan politik kala itu agar mendapatkan dukungan besar dari rakyat.

#### 4.3 Adakah Supersemar itu?

Permasalahan yang tidak bisa dilupakan yakni tentang keberadaan Surat Perintah 11 Maret 1966. Pertanyaan biasanya menyangkut adakah surat itu (tidak dipalsukan), apa isinya benar-benar seperti yang selama ini dipublikasikan, bila ada sekarang di mana tempatnya, bagaimana model surat itu (diktik atau ditulis tangan), mengapa surat itu tidak dipublikasikan sesuai aslinya, mengapa ada dua surat supersemar di satu buku berbeda modelnya, dan masih banyak yang lain.

Barangkali, pertanyaan-pertanyaan seperti itu seorang guru sulit untuk menjelaskan yang sebenarnya, tanpa dibekali pengetahuan sejarah yang cukup. Berdasarkan fakta-fakta yang ada bolehlah dijelaskan bahwa Supersemar itu ada, namun isi yang sebenarnya masih dalam penelitian. Yang jelas isi surat itu pelimpahan wewenang dan/atau **komando** dari seorang presiden yang juga sebagai Panglima Tertinggi ABRI dan Panglima Besar Revolusi (PBR) kepada pihak tentara untuk mengembalikan situasi yang kacau. Namun, yang terjadi berbeda dari yang dimaksud ataupun melenceng dari prosedur semestinya. Pihak militer tidak

melaporkan hasilnya kepada PBR sebagaimana lazimnya, militer malah bertindak sebagai pihak yang berwenang penuh dan mengambil posisi sebagai penguasa baru yang akan membawa ketenteraman dan kemakmuran bagi rakyatnya. Dengan didukung oleh kelompok nasionalis dan agamis, militer membersihkan PKI dan seluruh *onderbouw*-nya. Bahkan melarang keberadaan PKI beserta ajaran-ajaran Leninisme dan Marxisme di seluruh kawasan Indonesia melalui Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/1966.

Nah, uraian di atas menunjukkan pewarisan sejarah yang rasional dan arif, dan mungkin lebih cocok/pas daripada mengajarkan sejarah atau mewariskan sejarah kepada generasi penerus dengan bahan ajar yang cenderung mendiskreditkan ataupun memberikan cap buruk pada suatu kelompok lain tanpa ada penjelasan yang rasional yang hanya menumbuh-kembangkan dendam kesumat antarsesama warga negara. Dan lebih dari itu, peristiwa G 30 S 1965 -dan juga sejarah kolonialisme di Indonesia selama tiga abad lebih itu- selayaknya diposisikan dalam kerangka proses yang harus dilalui oleh bangsa Indonesia dalam menuju ke arah yang lebih baik. Artinya, bila ada “riak-riak kecil” kita anggap sebagai suatu kecelakaan dalam suatu proses menuju ke arah yang lebih baik (lebih adil, lebih sejahtera, lebih demokratis, dan lain-lain). Bila demikian, pelajaran sejarah tidak akan menimbulkan dendam kesumat antarsesama warga atau antarkelompok secara berkepanjangan di dalam negara tercinta, Indonesia.



## BAB III

### KESIMPULAN

#### 3.1 Simpulan

Berdasarkan paparan-paparan pada bab-bab sebelumnya, yakni tentang pelaksanaan proses pengabdian masyarakat dengan tema **REKONSTRUKSI DAN PELURUSAN SEJARAH TENTANG G 30 S PADA GURU-GURU SMU SE GERBANGKERTASUSILA**, maka dapatlah diambil beberapa simpulan.

1. Upaya sosialisasi rekonstruksi dan pelurusan sejarah –terutama tentang peristiwa G 30 S 1965- sangat diperlukan, kepada guru-guru SMU/SLTP se Kota Surabaya dan bahkan se kawasan Gerbangkertasusila (Gersik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan). Jadi, dapat dikatakan sangat bermanfaat bagi upaya mensukseskan program nasional pelurusan sejarah.
2. Di samping itu, peserta pelatihan (guru-guru SMU-SLTP) dapat mencoba ikut berpartisipasi dalam upaya rekonstruksi dan pelurusan sejarah, meskipun hanya pada taraf pasif.
3. Lebih dari itu, pengabdian ini dapat memberikan bekal bagi para guru sejarah di wilayah Gerbangkertasusila dalam mempersiapkan diri membuat/menulis sejarah lokal sebagai materi muatan lokal (Mulok) di daerahnya masing-masing, dalam rangka pendidikan berbasis kompetensi searah dengan proses otonomi daerah.

#### 3.2 Saran

Saran yang kami anggap perlu yakni lebih ditujukan pada pihak Universitas dalam hal ini Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Airlangga.

1. Perlunya peningkatan jumlah dana agar kualitas pengabdian sivitas akademika Unair dapat ditingkatkan.

## KEPUSTAKAAN

Gonggong, Anhar "G 30 S ("PKI") dan Supersemar: Analisis Historis" makalah Seminar Hari Pahlawan 56 MSI Cabang Jawa Timur 8 November 2001 di Untag Surabaya.

Ibrahim, Moh. Yusof, dkk., *Sejarawan dan Pensejarahan, Ketokohan dan Karya* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia, 1988), hlm. 305-306.

Gottschalk, Louis. *Mengerti Sejarah*. Terjemahan: Nugroho Notosusanto. Cetakan Kelima. Jakarta: UI Press, 1986.

Hecht, J. Jean. "Sejarah Masyarakat", dalam Taufik Abdullah dkk. ed. *Ilmu Sejarah dan Historiografi : Arah dan Perspektif*. Jakarta: Gramedia, 1985.

Kartodirdjjo, Sartono. Beberapa Fatsal dari Historiografi Indonesia, dalam *Lembaran Sejarah* No. 2 Agustus 1968.

\_\_\_\_\_. *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia: Suatu Alternatif*. Jakarta: Gramedia, 1982.

\_\_\_\_\_. "Melihat Sejarah dari Segi Baru", dalam Soeri Soeroto, dkk. ed. *Pemahaman Sejarah Indonesia, Sebelum dan Sesudah Revolusi*. Jakarta: LP3ES, 1984.

\_\_\_\_\_. *Multidimensi Pembangunan Bangsa: Etos Nasionalisme dan Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Yayasan Kanisius, 1999.

Kuntowijoyo, *Radikalisasi Petani, Esei-esei Searah*. Yogyakarta: Bentang, 1993.

\_\_\_\_\_. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Bentang, 1999.

Laslet, Peter. "Sejarah dan Ilmu-ilmu Sosial", dalam Taufik Abdullah dkk. ed. *Ilmu Sejarah dan Historiografi : Arah dan Perspektif*. Jakarta: Gramedia, 1985.

Mustopo, Habib, "Kebenaran Sejarah dan Kepentingan Kelompok", Makalah *Seminar Hari Pahlawan 56 MSI Cabang Jawa Timur, 8 November 2001* di Untag Surabaya.

Nash, Ronald H. ed. *Ideas of History*. Toronto and Vancouver: Clarke, Irwin and Company Limited, 1969.

Notosutanto, Nugroho. *Norma-norma Dasar Penelitian dan Penulisan Sejarah*.

Jakarta: Dephankam, Pusat Sejarah ABRI, 1971.

Ritter, Harry. *Dictionary of Concepts in History*. New York, Westport, Connecticut, London:Greenwood Press, 1986.

Siahaan, Harlem. "Subjektivitas Kekinian dalam Sejarah", dalam *Istoria*, No. 2 Th. 1986. BKMS Jurusan Sejarah Fakultas Sastra UGM.

Suryo, Djoko. *Sekitar Masalah Sejarah dengan Ilmu-ilmu Sosial, Sebuah Catatan, Seri Pemikiran dan Metodologi Sejarah*. Lembaran Sejjarah No. 4, Maret 1980. Jurusan Sejarah Fakultas Sastra UGM.

**DAFTAR PESERTA PENGABDIAN MASYARAKAT**

tentang

Klarifikasi dan Rekonstruksi Sejarah dalam Kerangka  
Pelurusan Sejarah (Penyuluhan kepada Guru-guru Bidang Studi  
Sejarah SMU/SLTP se Surabaya)

Tanggal 1 November 2002

<b>NO.</b>	<b>N A M A</b>	<b>ASAL SMU</b>
1	Drs. Hirman Pratikto	SMUN 2 Surabaya
2	Dra. Lilik Mulyati	SMU UNTAG Surabaya
3	Dra. Susi Sudarwati	SMUN 11 Surabaya
4	Dra. Lailil Chusnah	SMUN Krembung Sidoarjo
5	Dra. Erma S.P.	SMUN 2 Lamongan
6	Tutik S., S.Pd.	SMUN I Kamal, Bangkalan
7	Dra. Nanik	SMUN 1 Gresik
8	Dra. Niken L.	SMUN Puri Mojokerto
9	Drs. Miskanto W.	SMU Muhamadiyah 2 Surabaya
10	Sri Andriyani, S.Pd.	SMUN 7 Surabaya
11	Drs. Zaenal Arifin	SMUN I Sidoarjo
12	Drs. Moch. Chamdi	SMU Ta'miriyahh Surabaya
13	Dra. Resmi S.	SMUN 4 Surabaya
14	Dra. R. Dewi	SMUN 16 Surabaya
15	Dra. Johani	SMUN 1 Surabaya
16	Dra. Sulistiana	SMUN 5 Surabaya
17	Dra. Ligawati	SMUN 14 Surabaya
18	Dra. Endang D.	SMUN 6 Surabaya
19	Dra. Tri Murni	SMUN 17 Surabaya
20	Dra. Erna Mursiti	SMU GIKI 2 Surabaya
21	Dra. Sutji Handayani	SMUN 10 Surabaya
22	Dra. Saraswati	SMUN 20 Surabaya
23	Dra. Ismi'atan	SMUN 16 Surabaya
24	Drs. Mustofa Fanani	SMUN 16 Surabaya
25	V. Shintaningrum, S.Pd.	SMU UNTAG Surabaya

-1 MAR 2004

PAMERAN

30